

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN 2022



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2023

KATA PENGATAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan ini sebagai pertanggungjawaban serta bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar juga sebagai media informasi kepada publik atas capaian kinerja organisasi berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi atau bahan evaluasi yang dapat memberikan informasi kinerja secara akurat dan obyektif pada stakeholder untuk menciptakan kinerja yang lebih baik, demikian laporan kinerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat.

Benteng, Januari 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA



Drs. H. BASOK LEWA

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19640310 198611 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB.I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Maksud dan tujuan	1
I.3. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3.1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3.2. Struktur Organisasi	2
1.3.3. Cascading Kinerja	4
1.3.4. Dukungan SDM, sarana prasarana dan anggaran.....	5
I.4. Isu – Isu Strategis.....	8
I.5. Tindak lanjut atas LHE Sakip Tahun 2021	9
BAB.II. PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2021 - 2026	12
2.1.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda	15
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
2.2. Perjanjian Kinerja Utama.....	17
2.3. Rencana Kerja Tahunan	18
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	26
BAB.III. Akuntabilitas Kinerja.....	27
3.1. Pengukuran Kinerja	27
3.2. Analisis Capaian Kinerja	29
3.2.1. Pengukuran Capaian Sasaran ke-1	29

3.2.2. Pengukuran Capaian Sasaran ke-2	41
3.2.3. Pengukuran Capaian Sasaran ke-3	47
3.3. Realisasi Anggaran	52
BAB.IV. PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah pegawai ASN berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2022.....	5
Tabel 1.2.	Jumlah Aset Bappelitbangda Kep. Selayar per Desember 2022.....	6
Tabel 1.3.	Perbandingan dukungan anggaran tahun 2021 dan tahun 2022.....	8
Tabel 1.4.	Rumusan Masalah dan Isu Strategis.....	9
Tabel 2.1.	Ringkasan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi RPJMD Kab. Kep Selayar Tahun 2021-2026	13
Tabel 2.2.	Matriks Tujuan dan Sasaran Strategis.....	15
Tabel 2.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2021-2026.....	16
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2021 – 2026	17
Tabel 2.5.	Croscutting Sasaran Program dan Anggaran Rencana Kerja tahun 2022	18
Tabel 2.6.	Rencana Kerja Bappelitbangda Kep Selayar Tahun 2022.....	19
Tabel 2.7.	Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun Anggaran 2022	26
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 3.2.	Capaian IKU Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.....	28
Tabel 3.3.	Capain Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.....	28
Tabel 3.4.	Target dan realisasi kinerja sasaran ke-1	30
Tabel 3.5.	Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan program prioritas daerah tahun 2022.....	33

Tabel 3.6. Croscutting Sasaran Program Kegiatan	39
Tabel 3.7. Capaian Anggaran Sasaran ke-1	40
Tabel 3.8. Tingkat Efisiensi Sasaran ke-1.....	40
Tabel 3.9. Target dan realisasi kinerja sasaran ke-2	42
Tabel 3.10. Croscutting Sasaran Program Kegiatan	45
Tabel 3.11. Capaian Anggaran Sasaran ke-2	45
Tabel 3.12. Tingkat Efisiensi Sasaran ke-2.....	46
Tabel 3.13. Target dan realisasi kinerja sasaran ke-3	47
Tabel 3.14. Croscutting Sasaran Program Kegiatan	50
Tabel 3.15. Capaian Anggaran Sasaran ke-3	50
Tabel 3.16. Tingkat Efisiensi Sasaran ke-3.....	50
Tabel 3.17. Target belanja Bappelitbangda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022	52
Tabel 3.18. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022.....	53
Tabel 3.19. Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappelitbangda Kep Selayar.....	4
Gambar 1.2. Pohon Kinerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2022.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang mengandung azas Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Negara. Disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai Institusi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan atau APBN, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah;
- di dalam laporan kinerja ini terkandung instrument yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dengan maksud mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, disebutkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Struktur Organisasi

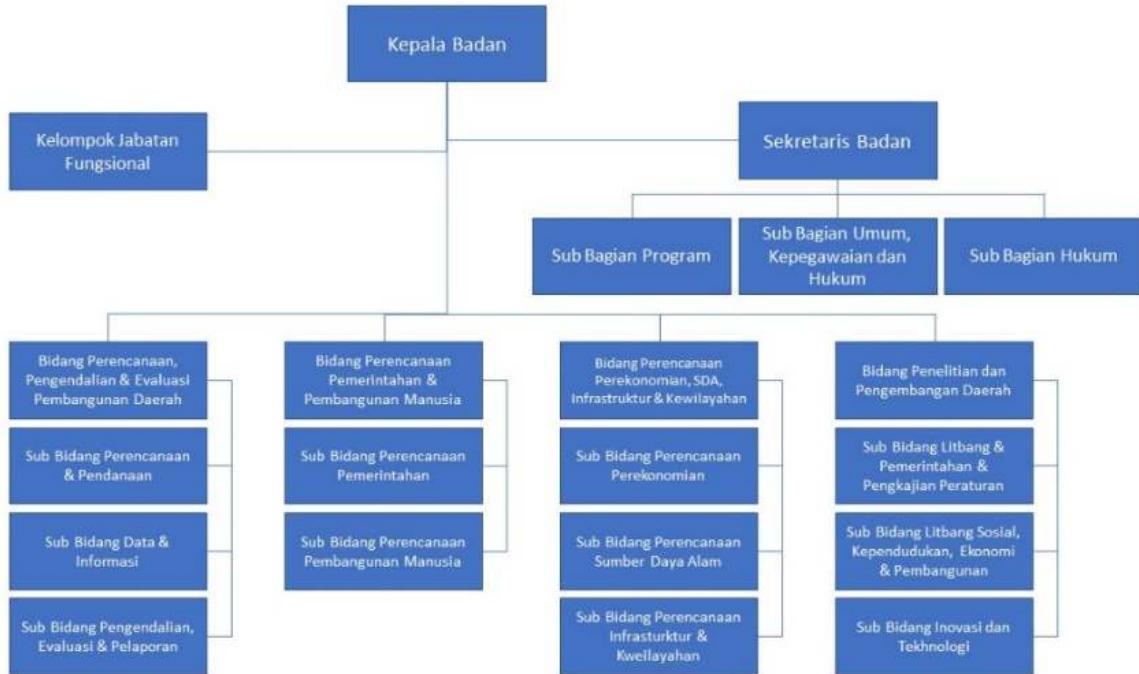
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subbidang Data dan Informasi; dan
 - c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
- 4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan Pemerintahan; dan
 - b. Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia.
- 5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan Perekonomian;
 - b. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Perencana Ahli; dan
 - b. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Bappelitbangda digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kep Selayar

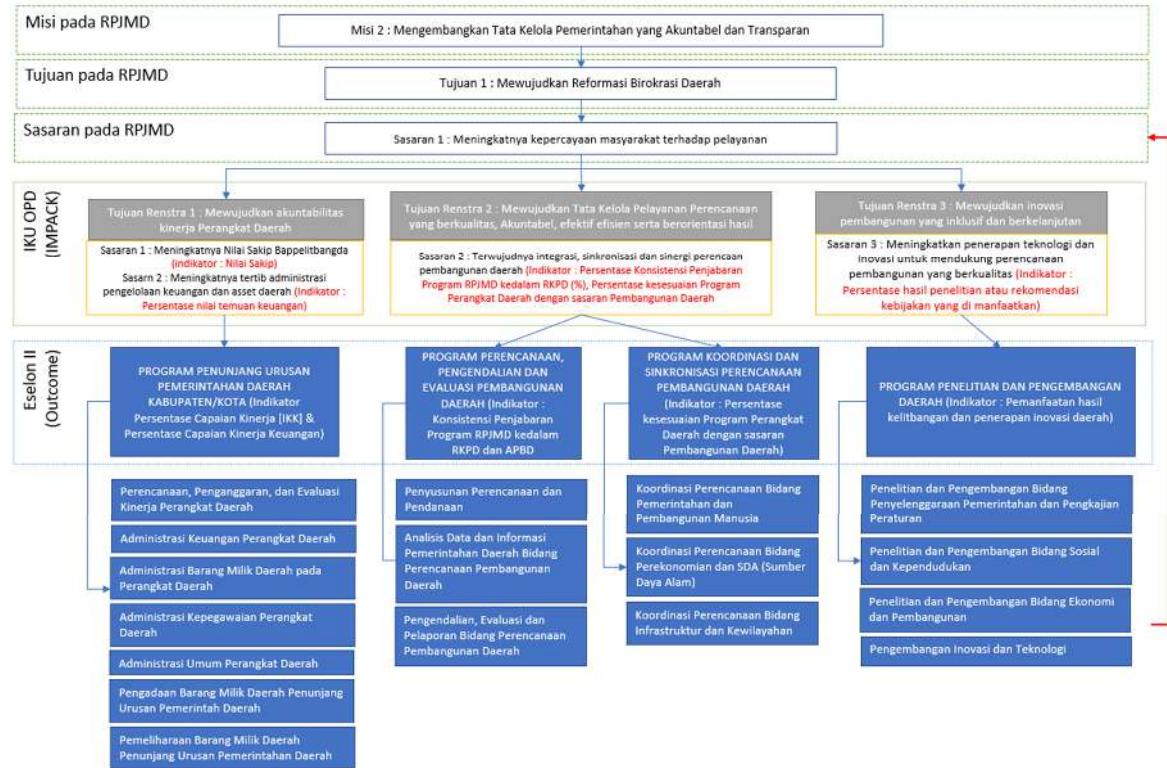


Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No 75 Tahun 2020

1.3.3. Cascading Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk agar dapat memberikan dukungan penuh dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Adapun cascading kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Pohon Kinerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2022



Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022

1.3.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana Dan Anggaran

Berdasarkan data Kepegawaian Bappelitbangda Kepulauan Selayar per Desember 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 30 pegawai negeri sipil yang terdiri dari :

Tabel. 1.1. Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2022

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	7	23,33%
	IV/c	1	3,33%
	IV/a	6	20,00%
2.	Golongan III	20	66,67%
	III / d	10	33,33%
	III / c	1	3,33%
	III / b	6	20,00%

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
	III / a	3	10,00%
3.	Golongan II	3	10,00%
	II / d	1	3,33%
	II / c	1	3,33%
	II / b	1	3,33%
	Jumlah	30	1

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2022

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Bappelitbangda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S3, S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 27 orang (90%). Sisanya berupa lulusan SMA sebanyak 3 orang (10%), selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 30 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 7 pegawai (23,33 %), golongan III sebanyak 20 pegawai (66,67%), dan golongan II sebanyak 3 pegawai (10%).

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dapat berjalan dengan baik, juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkesinambungan, daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran, sesuai rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.2. Jumlah Aset Bappelitbangda Kep. Selayar per Desember 2022

KODE ASET	Nama Bidang Barang	Jumlah	Jumlah Harga (Rp)
		Barang	
1	2	3	
03 ASET TETAP			
01 Tanah		-	
01 Tanah			
02 Peralatan Dan Mesin	344	3.048.575.955,00	
01 Alat Besar			
02 Alat Angkutan	36	1.057.139.100,00	
03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2	16.651.550,00	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KODE ASET	Nama Bidang Barang	Jumlah	Jumlah Harga (Rp)
		Barang	
1	2	3	
04	Alat Pertanian		-
05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	173	814.631.995,00
06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	13	170.523.200,00
07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		-
08	Alat Laboratorium	5	3.680.000,00
09	Alat Persenjataan		
10	Komputer	114	981.950.110,00
11	Alat Eksplorasi		
12	Alat Pengeboran		
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		
14	Alat Bantu Eksplorasi		
15	Alat Keselamatan Kerja	1	4.000.000,00
16	Alat Peraga		
17	Peralatan Proses/Produksi		
18	Rambu - Rambu		
19	Peralatan Olah Raga		
03	Gedung Dan Bangunan	4	2.728.745.053,00
01	Bangunan Gedung	4	2.728.745.053,00
02	Monumen		
03	Bangunan Menara		
04	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
04	Jalan, Jaringan Dan Irigasi		-
01	Jalan Dan Jembatan		
02	Bangunan Air		
03	Instalasi		
04	Jaringan		
05	Aset Tetap Lainnya	1	144.405.800,00
01	Bahan Perpustakaan	1	144.405.800,00
	Barang Bercorak		
02	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
03	Hewan		
04	Biota Perairan		
05	Tanaman		
06	Barang Koleksi Non Budaya		
07	Aset Tetap Dalam Renovasi		
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-
01	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
05	Aset Lainnya	105	675.608.750,00
02	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		-
01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
01	Aset Tidak Berwujud	2	56.800.000,00
01	Aset Lain-Lain	103	618.808.750,00

Sumber : Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar 2022

Tabel. 1.3. Perbandingan Dukungan Anggaran
Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tahun	Jumlah
2021	Rp. 7.112.120.900
2022	Rp. 5.133.941.600

Sumber : Bappelitbangda 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp. 5.133.941.600, menurun sebesar Rp. 1.978.179.300.

1.4. ISU – ISU STRATEGIS

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi dalam perencanaan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni dengan perumusan masalah atau identifikasi masalah dilakukan terlebih dahulu yang kemudian ditindak lanjuti dengan perumusan isu strategis.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan di buat. Kemudian isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah / panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dari hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang menyelenggarakan dua urusan yakni urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah dengan

memperhatikan kondisi atau hal yang terjadi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memberikan dampak yang positif dimasa depan yang jika tidak di antisipasi dapat menimbulkan kerugian dan menghilangkan peluang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, rumusan isu-isu strategis dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.4 Rumusan Masalah dan Isu Strategis

Rumusan masalah	Isu Strategis
1) Belum maksimalnya ketersediaan data pembangunan; 2) Penggunaan SIPD sebagai sistem infomasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan evaluasi belum terintegrasi	1) Memanfaatkan desiminasi data kepada semua perangkat daerah mengenai pengertian data, pemanfaatan data dan metedologi penyusunan; 2) Meningkatkan pemanfaatan sistem dalam koordinasi, asistensi, verifikasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan agar tercapai target visi dan misi pembangunan.

1.5. TINDAK LANJUT ATAS LHE SAKIP TAHUN 2021

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
1)	Perencanaan Kinerja	
a	Perjanjian Kinerja belum dipublikasikan Rekomendasi : Mempublikasikan Perjanjian Kinerja	Telah di publikasikan melalui website http://bappelitbangda.kepulauanselayarkab.go.id/
b	Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kinerja belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran Rekomendasi : Memanfaatkan Rencana Kinerja Tahunan dalam penyusunan anggaran	Terdapat perbedaan pagu anggaran antara renja dan DPA disebabkan Pagu pada Renja berdasarkan Renstra 2021-2026, sedang RKA/DPA berdasarkan Pagu Anggaran KUA-PPAS

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
2) Pengukuran Kinerja		
a	Indikator Kinerja Utama belum; memenuhi kriteria Indikator yang baik; Rekomendasi : IKU seharusnya memenuhi kriteria indikator yang baik	Telah di lakukan penyesuaian dengan merubah SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Tahun 2021-2026
b	Indikator Kinerja Utama belum cukup untuk mengukur kinerja Rekomendasi : IKU sebaiknya cukup untuk mengukur kinerja.	
c	Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala Rekomendasi : Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala per triwulan	Telah di lakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi yang dilakukan secara berkala per triwulan
d	Pengukuran Kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi Rekomendasi : Pengukuran kinerja yang dikembangkan menggunakan teknologi informasi	Akan di bahas pada level pengambil kebijakan
3) Pelaporan Kinerja		
a	Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan Rekomendasi : Mengandalkan Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja	Akan di laksanakan perbaikan dan penyesuaian dalam penyusunan laporan kinerja dengan lebih meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja sebagai bentuk tindak lanjut dalam berbagai upaya dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan
b	Informasi yang disajikan belum digunakan dalam perbaikan perencanaan Rekomendasi : Menyajikan informasi yang digunakan dalam perbaikan perencanaan	
c	Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Rekomendasi : Menyajikan Informasi yang digunakan	

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
	untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	
d	Informasi yang disajikan belum digunakan untuk pengingkatan kinerja Rekomendasi : Menyajikan informasi yang digunakan untuk peningkatan kinerja	
e	Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian Kinerja Rekomendasi : Menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja	
4) Evaluasi Internal		
a	Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya belum dilaksanakan Rekomendasi : Melaksanakan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	Telah di laksanakan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Individu dari Eselon III, IV, Fungsional Tertentu hingga Analis per triwulan
b	Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan Rekomendasi : Menindaklanjuti hasil – hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan	Akan meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi internal untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan ditindak lanjuti dalam bentuk Langkah nyata.
c	Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang Rekomendasi : Menindaklanjuti Hasil – hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang	Telah Menyusun SOP Pemberian Reward and Punishment bagi pegawai lingkup Bappelitbangda

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Perumusan rencana strategis dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, hal ini dilakukan agar akuntabilitas pencapaian sasaran program kegiatan yang mendukung sasaran strategis dapat disajikan.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, kemudian disusunlah tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun tujuan, sasaran dan strategi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada tabel berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 2.1

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026
Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1. Meningkatnya efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, penguatan sistem kelembagaan dan pengawasan, dan meningkatnya inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
Misi 2 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Perdesaan		
2. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan. 3. Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian perdesaan.	2. Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat perdesaan dan kualifikasi desa. 3. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya local dalam rangka mengembangkan lapangan kerja dan lapangan usaha di perdesaan.
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		
3. Meningkatkan Fasilitas pembangunan sumber daya Manusia	4. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar masyarakat 5. Meningkatnya daya beli masyarakat	4. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan Pendidikan dan Kesehatan 5. Meningkatkan pendapatan masyarakat
Misi 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
4. Mengoptimalkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia	6. Meningkatnya usaha perikanan 7. Meningkatnya Usaha Pariwisata	6. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana perikanan, penciptaan nilai tambah melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 7. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana kepariwisataan, daya Tarik destinasi, ekonomi kreatif, promosi, dan sumberdaya manusia pariwisata

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tujuan	Sasaran	Strategi
	8. Meningkatnya usaha industry, transportasi dan perdagangan	8. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana pengembangan industry, peningkatan akses tranportasi dan infrastruktur Pelabuhan, dan akselerasi perdagangan dalam dan luar wilayah melalui Kerjasama antar daerah
Misi 5 : Meningkatnya Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan		
5. Meningkatnya aktualisasi nilai budaya	9. Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan local dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	9. Meningkatkan peran Lembaga sosial dan keagamaan dalam pembangunan manusia dan daerah
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	10. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	
Misi 6 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup		
7. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	11. Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencamaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauann Selayar Tahun 2021 – 2026.

Melihat dari tabel diatas, Bappelitbangda mendukung pada misi 1, tujuan 1, sasaran 1, Adapun sasarannya yaitu : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda

Berdasarkan Visi Misi yang telah dirumuskan serta mempertimbangkan nilai – nilai dan faktor – faktor kunci keberhasilan maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang dimana tercantum dalam Rencana Srategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2021 – 2026, Adapun tujuan dan sasaran Bappelitbangda dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut :

Tabel 2.2 Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Rencana Strategis Bappelitbangda 2021			Target Kinerja Tahun Ke-				
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Sakip Bappelitbangda	Nilai Sakip	B	B	BB	BB	A
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Persentase nilai temuan keuangan	0%	0%	0%	0%	0%
Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang berkualitas, Akuntabel, efektif efisien serta berorientasi hasil	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	80%	85%	90%	95%	95%
Mewujudkan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Bappelitbangda Kep. Selayar 2021-2026

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan cara dan arah Tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode 5 tahun, adapun strategi dan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 dijabarkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (T1)	Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1. Meingkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik; 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;	1. Meningkatkan Kapabilitas kelembagaan Perencanaan, koordinasi dan kompetensi SDM Perencana; 2. Menerapkan pengelolaan sistem keuangan yang berbasis akrual sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan;
Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang berkualitas, Akuntabel, efektif efisien serta berorientasi hasil (T2)	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	3. Pengoptimalan Koordinasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah melalui sistem informasi terintegrasi; 4. Pengoptimalan Koordinasi Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;	3. Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang Didukung Pengendalian dan Evaluasi serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan; 4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Lingkup (a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, (b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan (c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya”;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (T3)	Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	5. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.	5. Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian yang aplikatif sebagai materi naskah akademik atau dalam bentuk pengambilan kebijakan (Policy Brief) bagi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta, Infrastruktur dan Kewilayahannya”.

Sumber : Renstra Bappelitbangda Kep. Selayar 2021-2026

2.2. Perjanjian Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja Utama merupakan dokumen penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja dan anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah telah melaksanakan rekomendasi hasil reviu SAKIP Tahun 2021 yakni dengan menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 18/I/Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama
Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan	Percentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	(Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD dibagi jumlah program dalam RPJMD) X 100%	Bappelitbangda Kep Selayar

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah	(Jumlah program prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah program prioritas pembangunan daerah) X 100%	Bappelitbangda Kep Selayar
2	Meningkatnya penerapan kelitbangsan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan/naskah akademik	(Jumlah hasil penelitian atau kajian yang menjadi bahan atau referensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibagi dengan penelitian atau kajian yang dihasilkan) x 100%	Bappelitbangda Kep Selayar

Sumber : Dokumen IKU Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2022

2.3. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahun 2022, Bappelitbangda Kepulauan Selayar melaksanakan 4 Program, 18 kegiatan dan 68 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5 Croscutting Sasaran Program dan Anggaran Rencana Kerja tahun 2022

No	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase Anggaran	Ket
1	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 656.629.000	12.79%	Bappelit bangda
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 572.653.000	11,15%	Bappelit bangda
2	Meningkatnya penerapan kelitbangsan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 555.236.000	10.82%	Bappelit bangda
3	Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /	Rp. 628.508.600	12.24%	Bappelit bangda
4	Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah		Rp. 2.720.915.000	53.00%	Bappelit bangda

Sumber : Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 2.6 Rencana Kerja Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2022

No		URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2022
1		2	3	4	5
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	63,03%	Rp. 3.349.423.600,00
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan	83,00%	
1		Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	Rp. 18.115.000,00
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappelitbangda	1 Dokumen	Rp. 1.500.000,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp. 2.115.000,00
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp. 3.000.000,00
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp. 3.000.000,00
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp. 3.000.000,00
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Rp. 4.000.000,00
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp. 1.500.000,00
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	Rp. 2.548.753.000,00
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Rp. 2.521.923.000,00
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	Rp. 16.000.000,00
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp. 7.810.000,00
	4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Peeriksaan	1 Dokumen	Rp. 3.020.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2022
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Percentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	100%	Rp. 6.000.000,00
	1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Brang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp. 3.000.000,00
	2 Penatausahaan Barang Milik Derah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Rp. 3.000.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya	100%	Rp. -
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 ASN	Rp. -
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan	100%	Rp. 352.907.800,00
	1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	500 Buah	Rp. 19.597.800,00
	2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bhaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Koran	Rp. 5.085.000,00
	3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	Rp. 328.225.000,00
	4 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp. -
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp. -
	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	Rp. -
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Rp. -
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	8 Unit	Rp. -
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp. 257.485.800,00
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp. 38.460.000,00
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp. 219.025.800,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2022
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	Rp. 166.162.000,00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Rp. 127.830.000,00
	2 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	3 Unit	Rp. 2.480.000,00
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Rp. 9.490.000,00
	4 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100m2	Rp. 19.950.000,00
	5 Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	14 Unit	Rp. 6.412.000,00
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	80%	Rp. 656.629.000,00
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Percentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	80%	Rp. 371.959.000,00
	1 Analisis Kondisi Daerah,Permasalahan, dan Isu Strategi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Teknokratik)	2 Dokumen	Rp. 4.974.000,00
	2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Telaahan	Rp. 177.003.000,00
	3 Pelaksaaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Rp. 15.275.000,00
	4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	1 Berita Acara	Rp. 38.115.000,00
	5 Penyipaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	11 Usulan Kecamatan	Rp. 16.345.000,00
	6 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang di Tetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Rp. 120.247.000,00
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%	Rp. 47.918.000,00
	1 Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Masukan	Rp. 20.868.000,00
	2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	32 Orang	Rp. 13.500.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2022
	3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Rp. 13.550.000,00
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan	100%	Rp. 236.752.000,00
	1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Rp. 34.596.000,00
	2 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerjasama	Rp. 10.420.000,00
	3 Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Rp. 191.736.000,00
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	80%	Rp. 572.653.000,00
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Percentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80%	Rp. 247.085.000,00
	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	11 Dokumen	Rp. 9.738.000,00
	2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	Rp. 11.540.000,00
	3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Rp. 8.250.000,00
	4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Rp. 51.552.000,00
	5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5 Dokumen	Rp. 12.026.000,00
	6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp. 20.400.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2022
	7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Rp. 59.440.000,00
	8 koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Rp. 74.139.000,00
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	80%	Rp. 116.622.000,00
	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	Rp. 16.216.000,00
	2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp. 4.740.000,00
	3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Rekomendasi	Rp. 13.688.000,00
	4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Dokumen	Rp. 31.280.000,00
	5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	Rp. 9.592.000,00
	6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp. 5.130.000,00
	7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Rekomendasi	Rp. 10.962.000,00
	8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Dokumen	Rp. 25.014.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2022
	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	80%	Rp. 208.946.000,00
	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	Rp. 8.782.000,00
	2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp. 5.000.000,00
	3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Rekomendasi	Rp. 110.754.000,00
	4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Dokumen	Rp. 56.594.000,00
	5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	12 Dokumen	Rp. 10.962.000,00
	6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Rp. 6.770.000,00
	7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Rekomendasi	Rp. 1.883.000,00
	8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Dokumen	Rp. 8.201.000,00
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangda dan penerapan inovasi daerah	100%	Rp. 555.236.000,00
	1 Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan		Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan	100%	Rp. 301.399.000,00
	1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Dokumen	Rp. 65.739.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2022
	2 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen	Rp. 235.660.000,00
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Percentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan	100%	Rp. 148.421.000,00
	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang Aspek Aspek Sosial	2 Dokumen	Rp. 148.421.000,00
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Percentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan	100%	Rp. -
	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Rp. -
	2 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Rp. -
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Percentase Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi	50%	Rp. 105.416.000,00
	1 Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen hasil penelitian, pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Rp. 50.549.000,00
	2 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	3 Jenis	Rp. 54.867.000,00
	T O T A L				Rp. 5.133.941.600,00

Sumber : DPA Perubahan Bappelitbangda Tahun Anggaran 2022

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kep Selayar Tahun Anggaran 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang berkualitas, Akuntabel, efektif efisien serta berorientasi hasil	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	80%
			Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah	80%
2	Mewujudkan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya penerapan kelitebang (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan/naskah akademik	100%
3	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda	Nilai Sakip	B
		Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Persentase nilai temuan keuangan	0%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Bappelitbangda Kep Selayar

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi, adapun Bappelitbangda Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang telah diperjanjikan Kepala Bappelitbangda dengan Bupati Kepulauan Selayar tahun 2022. Dengan perhitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana Tingkat Capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau Muda
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning Tua
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Sebagai implementasi dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kepulauan Selayar Nomor : 18/I/Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian IKU Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Satu an	Target	Realis asi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	80%	100%	125%
		Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah	%	80%	100%	125%
2.	Meningkatnya penerapan kelitbangsan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas.	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan/naskah akademik	%	100%	100%	100%

Sumber : Bappelitbangda Kep Selayar Tahun 2022

Adapun sasaran, indikator dan capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Satu an	Tar get	Realis asi	Capaian Kinerja (%)	Kode
1.	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	80	100	125%	
		Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah	%	80	100	125%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satu an	Tar get	Realis asi	Capaian Kinerja (%)	Kode
2.	Meningkatnya penerapan kelitongan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas.	Percentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan/naskah akademik	%	100	100	100%	
3.	Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda	Nilai Sakip	Nilai	B (60)	CC* (52.36)	87.27%	
	Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Percentase nilai temuan keuangan	%	0	0*	100%	

Sumber : Bappelitbangda Kep Selayar Tahun 2022

* Capaian Tahun 2021

Bappelitbangda memiliki 5 (lima) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis Bappelitbangda Kepulauan Selayar. Pada tahun 2022, persentase capaian sebesar 107.45% dengan 1 Indikator hasil pengukuran tahun 2021 yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Selanjutnya hasil pengukuran dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta Indikator-Indikator Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 :

3.2.1. Pengukuran Capaian Sasaran ke - 1

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke-1 mempunyai 2 (dua) indikator kinerja. Sasaran ke-1 ini menjadi sasaran yang berfokus pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, sasaran ke-1, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	: Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD; 2. Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-1

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2021)	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	80	100	125	95	105.26
2.	Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah	100	80	100	125	95	105.26

Sumber Bappelitbangda Kep Selayar 2022

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-1**

- ❖ Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebesar 100%**.
- ❖ Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, terdapat 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) program dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 terdapat 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) program. Hal tersebut juga dapat dilihat pada laporan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pada Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 halaman 42.

Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini, diantaranya adalah :

1. Kegiatan rapat-rapat guna klarifikasi hasil finalisasi Program kegiatan dan sub kegiatan
2. Sistem informasi Perencanaan Pembangunan e-planning (SIPD).

Saat ini Bappelitbangda menggunakan aplikasi e-planning (SIPD) terpusat yang disediakan oleh kemendagri, sistem ini berfungsi sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah dalam proses perencanaan yang terintegrasi dengan beberapa sistem di kemendagri, seperti penganggaran pelaporan dan evaluasi.

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-2**

- ❖ Tabel 3.4 diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indikator kinerja sasaran yaitu ***Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah sebesar 100%.***

Perumusan program prioritas tahun 2022 mengacu pada tema fokus dan sasaran pembangunan tahun 2022, dimana arah kebijakan nasional yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas keluarga;

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang didukung oleh kajian lingkungan; percepatan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk penurunan angka kemiskinan, dan pemulihan ekonomi; pengelolaan sumber daya alam dengan memanfaatkan potensi kemaritiman, diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata terhadap perekonomian daerah; peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, diarahkan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan reformasi birokrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2022 sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka penjelasan keterkaitan antara sasaran prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas pembangunan daerah seperti tertuang pada dokumen RKPD perubahan tahun 2022 halaman 108 dijabarkan pada tabel berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 3.5 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2022

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1.	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Indeks pendidikan	Program pengelolaan pendidikan (SPM)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-15 tahun (Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni)	Disdikpora
				Program pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah	Disdikpora
				Program pengembangan kurikulum	Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar	Disdikpora
				Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum	Disdikpora
				Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Disdikpora
			Indeks kesehatan	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Disdikpora
				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (SPM)	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Dinkes
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Dinkes
		Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks ketahanan sosial	Program pengembangan kebudayaan	Rasio Tenaga Kesehatan (dokter, tenaga medis dan bidan) per satuan penduduk	Dinkes
		Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka kriminalitas			
2.	Pembangunan infrastruktur berbasis daya	Meningkatnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta	Indeks kualitas air	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	DLH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
	dukung dan daya tampung lingkungan hidup	meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks kualitas udara	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	DLH
			Indeks kualitas tutupan lahan	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) Program perencanaan lingkungan hidup	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	DLH
		Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks desa membangun	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Sarana pertanian Cakupan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
3.	Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita disetarakan	Program pemberdayaan sosial	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil (KAT) yang mendapatkan pengembangan kemampuan dan potensi	Dinas Sosial
				Program rehabilitasi sosial (SPM)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Dinas Sosial
				Program penanganan bencana (SPM)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Dinas Sosial
				Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dinas PMPTSPTK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian perdesaan			Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Cakupan ketersedian infrastruktur cadangan pangan	Dinas Pertanian
				Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	Dinas Pertanian
				Program perencanaan dan pembangunan industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Disperindag UMKM
				Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Disperindag UMKM
				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Disperindag UMKM
				Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Peningkatan Penyediaan Sarana Pendistribusian Perdagangan	Disperindag UMKM
				Program pengembangan umkm	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Disperindag UMKM
				Program pemasaran pariwisata	Jumlah Promosi Pariwisata yang dikembangkan	Disparbud
			Tingkat pengangguran terbuka	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas PMPTSPTK
			Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	DP3AP2KB	
		Angka kemiskinan		Program pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	DP3AP2KB
				Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	DP3AP2KB

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
4.	Pengelolaan sumber daya alam dengan memanfaatkan potensi kemanusiaan	Meningkatnya usaha perikanan, pariwisata serta Industri, Transportasi dan Perdagangan		Program pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak	DP3AP2KB
				Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	DP3AP2KB
				Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	DP3AP2KB
				Program pembinaan perpustakaan	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera	DP3AP2KB
				Program pengembangan sumber daya manusia	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	DPK
			Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Program promosi penanaman modal	Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan	Dinas PMPTSPTK
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
				Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD kabupaten	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	Disparbud
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparbud
			Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Peningkatan Penyediaan Sarana Pendistribusian Perdagangan	Disperindag UMKM
				Program pengembangan ekspor	Jumlah Komoditi Perdagangan dengan Kualitas Ekspor	Disperindag UMKM
				Program perencanaan dan pembangunan industri	Jumlah Industri yang Terbangun	Disperindag UMKM

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
5.	Pemantapan pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat	Program pengelolaan pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	Dinas Perhubungan
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Semua OPD
				Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satpol PP Damkar & Penyelamatan
				Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non kebakaran	Satpol PP Damkar & Penyelamatan
				Program penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD
				Program penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD
				Program pengelolaan persampahan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	DLH
				Program pendaftaran penduduk	Perekaman KTP Elektronik	Disdukcapil
				Program pencatatan sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil
				Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo SP
			Nilai sakip daerah	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Diskominfo SP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
				Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Diskominfo SP
				Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Disperindag KUKM
				Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Capaian Kinerja Program RPJMD	Bappelitbangda
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD	Bappelitbangda
				Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi	Bappelitbangda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Program pengelolaan keuangan daerah	Rasio Belanja Derah terhadap Pendapatan Darah	BPKPD
				Program pengelolaan barang milik daerah	Assets Management	BPKPD
				Program kepegawaian daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKPSDM
				Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat

Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauann Selayar Nomor 84

Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Tabel 3.6 diatas menunjukkan keselarasan terkait indikator kinerja 64 (enam puluh empat) program prioritas perangkat daerah dengan 17 (tujuh belas) indikator sasaran prioritas pembangunan daerah, hal tersebut juga dapat dilihat pada laporan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pada Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 halaman 108.

❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2026**

Melihat dari keterkaitan target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator ke-1, dan ke-2 maka dapat dilihat bahwasanya tahun pertama renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 100%.

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensi**

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran Pertama ini didukung oleh **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan** dan **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** yang terdapat di tiga Bidang yakni Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayah, dan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Tabel 3.6 Corscutting Sasaran Program Kegiatan

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah (S3)	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas) <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran	Program/Kegiatan
	2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian Anggaran Sasaran ke-1

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realiasasi	Capaian
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Rp. 1.229.282.000	Rp. 1.161.970.035	94.52%

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-1

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	125%	94.52%	24.38%

Dari kedua tabel diatas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.161.970.035 atau 94.52% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 125%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-1 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 24.38%, seperti yang digambarkan pada tabel 3.8

- ❖ Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah :
 - a. Pendukung :
 - Komitmen pimpinan / para pemangku kebijakan di daerah terhadap program;
 - Konsistensi dalam implementasi program;
 - Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi baik pusat maupun provinsi dan stakeholder terkait.
 - b. Permasalahan :
 - Kuantitas tenaga fungsional perencana yang belum memadai;
 - Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan perangkat daerah.
 - c. Solusi
 - Menyediakan data pembangunan daerah yang valid;
 - Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Organiasi Perangkat Daerah, baik dari sasaran daerah, sasaran perangkat daerah, program, kegiatan dan Sub kegiatan;
 - Meningkatkan evaluasi program dan kegiatan guna mendukung pencapaian kinerja;
 - Mengoptimalkan manajemen kinerja perangkat daerah dalam mengatasi keterbatasan SDM Perencana.

3.2.2. Pengukuran Capaian Sasaran ke - 2

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke-2 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja. Sasaran ke-2 ini menjadi sasaran yang berfokus pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, sasaran ke-2, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran :	Meningkatnya penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas
Indikator :	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan/naskah akademik

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9 Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-2

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2021)	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
3.	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik (2)	100	100	100	100	100	100

➤ Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-3

- ❖ Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-2 dengan indikator kinerja sasaran yaitu ***Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik sebesar 100%.***

Terdapat 2 hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan daerah / naskah akademik pada kegiatan penyusunan Rancangan Awal dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, dan 1 hasil kelitbangan dimanfaatkan untuk inovasi daerah Tahun 2022.

Adapun judul dari 3 kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yaitu :

1. Survei Kepuasan Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021;

2. Survei Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, dan;
3. Analisis Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil Inovasi daerah terkait Analisis Indeks Daya Saing Daerah bertujuan untuk mendorong peningkatan aspek yang menjadi titik lemah daya saing daerah. Prioritas program penguatan daya saing daerah adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan nilai tambah produk-produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
- b) Peningkatan kualitas produk-produk UMKM;
- c) Peningkatan jaringan pemasaran produk-produk UMKM berbasis online;
- d) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kelitbangsaan;
- e) Peningkatan Kerjasama dan kemitraan Lembaga-lembaga inovatif;
- f) Pembangunan infrastruktur dasar fisik dan non fisik penguatan SIDa;
- g) Peningkatan budaya inovasi pada OPD dan Masyarakat;
- h) Peningkatan arus investasi yang sejalan dengan inovasi;
- i) Peningkatan kapasitas para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan;
- j) Peningkatan pelayanan publik berbasis digital;
- k) Penataan administrasi kependudukan berbasis digital;
- l) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- m) Pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi.

Tahun 2022, Bappelitbangda Kepulauan Selayar melaksanakan 5 (lima) kegiatan kelitbangsaan, 2 (dua) diantaranya dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

pembangunan daerah pada penyusunan naskah akademik Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023, diantaranya : 1) Penyusunan Naskah Akademik (Ranwal) Dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045; 2) Dokumen Revisi RPJMD Kepulauan Selayar 2021-2026; dan 3) Dokumen RKPD Kepulauan Selayar Tahun 2024).

3 (tiga) hasil kelitbangan lainnya dimanfaatkan untuk inovasi daerah tahun 2023. Adapun judul dari 5 (lima) kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yaitu :

1. Survei Kepuasan Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022;
2. Survei Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022;
3. Kajian Evaluasi Penataan Dapil Pemilu 2024 di Kepulauan Selayar;
4. Laporan penginputan dan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
5. Laporan penginputan dan pengukuran Innovation Government Award.

❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2026**

Melihat dari keterkaitan target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator ke-3, maka dapat dilihat bahwasanya tahun pertama renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 100%

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensi**

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran Kedua ini didukung oleh **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** yang terdapat di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 3.10 Croscutting Sasaran Program dan Kegiatan

Sasaran	Program/Kegiatan
Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	a. Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan
	b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11 Capaian Anggaran Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realiasasi	Capaian
Meningkatnya penerapan kelitbangsan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas (S2)	Rp. 555.236.000	Rp. 516.311.305	92.99%

Dari kedua tabel diatas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 516.311.305 atau 92.99% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-2 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 25.61%, seperti yang digambarkan pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	125%	92.99%	25.61%

- ❖ Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah :
- Pendukung :
 - Koordinasi yang baik antara Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Stakeholder terkait dalam meningkatkan inovasi daerah guna mendukung inovasi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Kontribusi dan dukungan berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda.
 - Permasalahan :
 - Belum tersedianya data base kelitbangan yang akurat dan up to date guna mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan kelitbangan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan strategis;
 - Belum adanya database inovasi daerah lingkup OPD.
 - Solusi
 - Membuat database kelitbangan dengan menyesuaikan isu aktual dan strategis yang terjadi;
 - Membuat sistem data base inovasi daerah yang ada di setiap OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama guna mendorong pengembangan penelitian dan inovasi daerah.

3.2.3. Pengukuran Capaian Sasaran ke - 3

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke-3 mempunyai 2 (dua) inikator kinerja. Sasaran ke-3 ini menjadi sasaran yang berfokus pada Bidang Sekretariat, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	: Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah
Indikator	: 1. Nilai Sakip 2. Persentase Nilai Temuan Keuangan

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-3

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2020)	2021			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
4.	Nilai Sakip	C (49.93)	60 (B)	CC* (52.36)	87,27%	80 (A)	65,45%
5.	Persentase Nilai Temuan Keuangan	0	0	0*	100%	0	100%

Sumber Bappelitbangda Kep Selayar 2022

*Capaian kinerja Tahun 2021

➤ Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-4

- ❖ Tabel 3.13 diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-3 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **Nilai Sakip sebesar 87.27%**.

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran ke-3, dengan indikator kinerja **Nilai Sakip** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2022, karena pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2022 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan

Selayar. Adapun target yang ingin dicapai oleh Bappelitbangda Kepulauan Selayar tahun 2022 mendapat nilai B (60) dengan capaian kinerja 100%.

Disampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian SAKIP Bappelitbangda Nomor : 065/LAKIP/IV/2022/ITDA tanggal 13 April 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, bahwasanya Bappelitbangda memperoleh nilai sebesar 52.36 dengan kategori CC (Cukup), dengan demikian Bappelitbangda akan terus bekerja lebih giat agar dapat terus meningkatkan nilai Sakip yang diperoleh.

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-5**

- ❖ Tabel 3.13 diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-3 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **Persentase Nilai Temuan Keuangan sebesar 100%**.

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran ke-3, dengan indikator kinerja **Persentase Nilai Temuan Keuangan** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2022, dikarenakan pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun target yang ingin dicapai tahun 2022 pada review Inspektorat sebesar 0% dengan capaian kinerja 100%.

Disampaikan bahwa berdasarkan surat tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 700/068/PKPT/VII/2022/ITDA/ tanggal 20 Juli 2022 dan laporan pemeriksaan regular pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022, bahwasanya untuk tahun 2021,

Bappelitbangda Kepulauan Selayar **telah menindaklanjuti hasil temuan** yang tidak di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp.73.282.000.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2026**

- a. Pada sasaran ke-3 Indikator ke-1 yaitu **Nilai Sakip**, maka dapat dilihat bahwasanya realisasi tahun pertama Renstra mendapat nilai Sakip 52.36* atau Predikat CC* dengan Capaian 87.27%. jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 80 atau predikat A, maka Bappelitbangda akan terus berupaya dan berkomitmen dalam meningkatkan Nilai SAKIP, sehingga pada tahun terakhir Renstra target tersebut dapat diraih atau bahkan melebihi dari target tahun terakhir Renstra Bappelitbangda;
- b. Pada sasaran ke-3, Indikator 2 yaitu **Persentase Nilai Temuan Keuangan**, maka dapat dilihat bahwasanya Realisasi tahun pertama Renstra sebesar 0% dengan capaian 100%, maka dapat dilihat bahwasanya tahun pertama renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 100%.

Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan memonitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini diantaranya kegiatan rapat-rapat guna evaluasi program dan kegiatan.

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensi**
Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran Kedua ini didukung oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

Tabel 3.14 Croscutting Sasaran Program dan Kegiatan

Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	b. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
	c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15 Capaian Anggaran Sasaran ke-3

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realiasasi	Capaian
1. Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda	Rp.3.349.423.600	Rp.3.309.886.494	98.82%
2. Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah			

Tabel 3.16 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-3

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1. Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda	87.27*		
2. Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	100*		
Rata-rata Capaian Kinerja	94,64*	98.82%	98.94

* = capaian Kinerja tahun 2021

Dari kedua tabel diatas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.3.309.886.494 atau 98.82% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 94.64%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-3 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 98,94%, seperti yang digambarkan pada tabel 3.16

- ❖ Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah :
 - d. Pendukung :
 - Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam lingkup kerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar;
 - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
 - Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja.
 - e. Permasalahan :
 - Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi dan manajemen yang berbasis kinerja.
 - f. Solusi
 - Peran aktif pejabat struktural dalam mengawal program dan kegiatan baik dari kinerja maupun anggaran;

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran. Pelaksanaan kegiatan rutin dalam hal pemeliharaan, pengadaan serta yang sifatnya pelayanan dilakukan pengukuran yang lebih terukur dengan pencapaian target kerja yang akan dicapai;
- Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan;
- Terus meningkatkan kualitas dokumen SAKIP dalam rangka pencapaian sasaran yang berorientasi hasil.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran menjadi faktor pendukung dan berpengaruh dalam rangka mencapai indikator keberhasilan. Program dan kegiatan juga dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai. Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan target belanja setelah perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.133.941.600,- dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.17 target belanja Bappelitbangda APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp. 5.133.941.600	100,00%
1.1	Gaji Pokok PNS	Rp. 2.521.923.000	49,12%
1.2	Belanja Barang Jasa	Rp. 2.612.018.600	50,88%
2	Belanja Modal	0	0%
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0%
2.2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0,00%

Adapun sumber pembiayaan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi anggaran tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 3.18 Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022

No	URAIAN	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi Tertimbang	
					Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.349.423.600,00	3.309.886.494,00	39.537.106,00	100,00	98,39
1	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.115.000,00	18.115.000,00	-	100,00	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.115.000,00	2.115.000,00	-	100,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	100,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.548.753.000,00	2.516.779.348,00	31.973.652,00	100,00	99,68
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.521.923.000,00	2.489.949.348,00	31.973.652,00	100,00	98,73
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.810.000,00	7.810.000,00	-	100,00	100,00
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.020.000,00	3.020.000,00	-	100,00	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.998.000,00	2.000,00	100,00	99,97
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Brang Milik Daerah Pada SKPD	3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	100,00	99,93
2	Penatausahaan Barang Milik Derah Pada SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	100,00
4	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.907.800,00	352.411.273,00	496.527,00	100,00	98,17
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.597.800,00	19.597.800,00	-	100,00	100,00
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.085.000,00	4.810.000,00	275.000,00	100,00	94,59
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	328.225.000,00	328.003.473,00	221.527,00	100,00	99,93

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi Tertimbang	
					Fisik	Keuangan
	4 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
1	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	257.485.800,00	250.593.093,00	6.892.707,00	100,00	92,60
1	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	38.460.000,00	33.019.293,00	5.440.707,00	100,00	85,85
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.025.800,00	217.573.800,00	1.452.000,00	100,00	99,34
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.162.000,00	165.989.780,00	172.220,00	100,00	99,89
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	127.830.000,00	127.738.430,00	91.570,00	100,00	99,93
2	Pemeliharaan Mebel	2.480.000,00	2.479.400,00	600,00	100,00	99,98
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.490.000,00	9.490.000,00	-	100,00	100,00
4	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.950.000,00	19.873.950,00	76.050,00	100,00	99,62
5	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.412.000,00	6.408.000,00	4.000,00	100,00	99,94
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	656.629.000,00	623.292.292,00	33.336.708,00	100,00	216,88
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	371.959.000,00	357.121.517,00	14.837.483,00	100,00	96,68
1	Analisis Kondisi Daerah,Permasalahan, dan Isu Strategi Pembangunan Daerah	4.974.000,00	4.974.000,00	-	100,00	100,00
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	177.003.000,00	170.811.588,00	6.191.412,00	100,00	96,50
3	Pelaksaaan Konsultasi Publik	15.275.000,00	15.275.000,00	-	100,00	100,00
4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	38.115.000,00	38.115.000,00	-	100,00	100,00
5	Penyipian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	16.345.000,00	14.600.000,00	1.745.000,00	100,00	89,32

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi Tertimbang	
					Fisik	Keuangan
	6 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	120.247.000,00	113.345.929,00	6.901.071,00	100,00	94,26
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	47.918.000,00	47.376.487,00	541.513,00	100,00	99,05
	1 Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.868.000,00	20.424.800,00	443.200,00	100,00	97,88
	2 Pembinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	13.500.000,00	13.401.687,00	98.313,00	100,00	99,27
	3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	13.550.000,00	13.550.000,00	-	100,00	100,00
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	236.752.000,00	218.794.288,00	17.957.712,00	100,00	63,45
	1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	34.596.000,00	34.226.814,00	369.186,00	100,00	98,93
	2 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	10.420.000,00	9.291.474,00	1.128.526,00	100,00	-
	3 Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	191.736.000,00	175.276.000,00	16.460.000,00	100,00	91,42
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	572.653.000,00	538.677.743,00	33.975.257,00	100,00	92,89
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	247.085.000,00	228.083.200,00	19.001.800,00	100,00	89,29
	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.738.000,00	9.648.000,00	90.000,00	100,00	99,08
	2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah	11.540.000,00	6.525.000,00	5.015.000,00	100,00	56,54
	3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.250.000,00	8.220.000,00	30.000,00	100,00	99,64
	4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	51.552.000,00	44.463.800,00	7.088.200,00	100,00	86,25
	5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	12.026.000,00	10.816.000,00	1.210.000,00	100,00	89,94
	6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.400.000,00	17.775.000,00	2.625.000,00	100,00	87,13

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi Tertimbang	
					Fisik	Keuangan
	7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	59.440.000,00	58.540.000,00	900.000,00	100,00	98,49
	8 koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	74.139.000,00	72.095.400,00	2.043.600,00	100,00	97,24
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	116.622.000,00	115.633.547,00	988.453,00	100,00	98,25
	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	16.216.000,00	16.076.000,00	140.000,00	100,00	99,14
	2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.740.000,00	4.719.000,00	21.000,00	100,00	99,56
	3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	13.688.000,00	13.588.000,00	100.000,00	100,00	99,27
	4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	31.280.000,00	31.198.347,00	81.653,00	100,00	99,74
	5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	9.592.000,00	9.592.000,00	-	100,00	100,00
	6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.130.000,00	4.540.000,00	590.000,00	100,00	88,50
	7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.962.000,00	10.962.000,00	-	100,00	100,00
	8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	25.014.000,00	24.958.200,00	55.800,00	100,00	99,78
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana	208.946.000,00	194.960.996,00	13.985.004,00	100,00	91,14
	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.782.000,00	8.602.000,00	180.000,00	100,00	97,95
	2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.000.000,00	4.705.000,00	295.000,00	100,00	94,10
	3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	110.754.000,00	100.754.000,00	10.000.000,00	100,00	90,97
	4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	56.594.000,00	56.563.796,00	30.204,00	100,00	99,95

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi Tertimbang	
					Fisik	Keuangan
	5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahana (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	10.962.000,00	10.886.400,00	75.600,00	100,00	99,31
	6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahana	6.770.000,00	3.525.000,00	3.245.000,00	100,00	52,07
	7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahana	1.883.000,00	1.803.000,00	80.000,00	100,00	95,75
	8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahana	8.201.000,00	8.121.800,00	79.200,00	100,00	99,03
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	555.236.000,00	516.311.305,00	38.924.695,00	100,00	89,57
1	Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan	301.399.000,00	300.586.279,00	812.721,00	100,00	99,56
1	1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	65.739.000,00	65.253.479,00	485.521,00	100,00	99,26
2	2 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	235.660.000,00	235.332.800,00	327.200,00	100,00	99,86
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	148.421.000,00	131.101.000,00	17.320.000,00	100,00	88,33
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	148.421.000,00	131.101.000,00	17.320.000,00	100,00	88,33
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-	-	-
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-
2	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	105.416.000,00	84.624.026,00	20.791.974,00	100,00	80,82
1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	50.549.000,00	47.607.500,00	2.941.500,00	100,00	94,18
2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangsa	54.867.000,00	37.016.526,00	17.850.474,00	100,00	67,47
	T O T A L	5.133.941.600,00	4.988.167.834,00	145.773.766,00	100,00	97,16

Sumber : DPA Perubahan Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	URAIAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja TW 1	Realisasi Kinerja TW 1	Target Kinerja TW 2	Realisasi Kinerja TW 2	Target Kinerja TW 3	Realisasi Kinerja TW 3	Target Kinerja TW 4	Realisasi Kinerja TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Fisik	Persen	25%	14,73%	50%	42,62%	75%	56,54%	100%	100,00%
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan		20%	10,12%	40%	30,71%	60%	47,59%	83%	96,81%
1	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappelitbangda	Dokumen	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	1	1	0	0	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	0	0	0	0	0	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	3	3	5	5	3	3	3	3
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	0	0	0	0	0	0
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Peleksaanaan	Dokumen	0	0	1	1	0	0	0	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja TW 1	Realisasi Kinerja TW 1	Target Kinerja TW 2	Realisasi Kinerja TW 2	Target Kinerja TW 3	Realisasi Kinerja TW 3	Target Kinerja TW 4	Realisasi Kinerja TW 4
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	PerSEN	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Brang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	2	2	0	0	2	2
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	1	1	0	0	1	1
4	Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya	PerSEN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	0	0	7	0	0	0	0	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan	PerSEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Buah	125	125	125	125	125	125	125	125
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Koran	14	14	14	14	14	14	14	14
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	18	15	19	15	40	15	39
4	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	0
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	PerSEN	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	0	0	0	0	0	0	0
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	8	0	0	0	0	0	0	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	PerSEN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	PerSEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja TW 1	Realisasi Kinerja TW 1	Target Kinerja TW 2	Realisasi Kinerja TW 2	Target Kinerja TW 3	Realisasi Kinerja TW 3	Target Kinerja TW 4	Realisasi Kinerja TW 4
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	17	17	17	17	17	17
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	3	3	0	0	0	0	0	0
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	12	5	0	0	0	7
4	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	m2	0	0	0	0	0	0	100	100
5	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	14	14	0	0	14	0	14	0
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	Per센	0%	0%	80%	100%	80%	100%	0%	0%
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Percentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	Per센	0%	0%	80%	100%	80%	100%	0%	0%
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategi Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di Dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Dokumen	2	1	0	1	0	0	0	0
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Telaahan	0	0	0	0	1	1	1	1
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Penyipian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	405	405	0	0	0	0	0	0
6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	1	1	1	1	0	0
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	Per센	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
1	Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Masukan	68	71	0	0	0	0	0	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja TW 1	Realisasi Kinerja TW 1	Target Kinerja TW 2	Realisasi Kinerja TW 2	Target Kinerja TW 3	Realisasi Kinerja TW 3	Target Kinerja TW 4	Realisasi Kinerja TW 4
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaaan Pembangunan SKPD	Terbinanya Sumber Daya manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaaan Pembangunan	Orang	38	38	0	0	0	0	0	0
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku	0	0	0	0	1	1	0	0
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	0	0	0	0	1	1
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang di Koordinasikan Pelaksanaannya	Kerjasama	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	Persen	80%	100%	0%	0%	80%	100%	0%	0%
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	80%	100%	0%	0%	80%	100%	0%	0%
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	0	0	11	11	0	0	0	0
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	OPD	0	11	11	0	0	0	0	0
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja TW 1	Realisasi Kinerja TW 1	Target Kinerja TW 2	Realisasi Kinerja TW 2	Target Kinerja TW 3	Realisasi Kinerja TW 3	Target Kinerja TW 4	Realisasi Kinerja TW 4
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	0	0	5	5	0	0	0	0
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	OPD	0	5	5	0	0	0	0	0
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Percentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	80%	100%	0%	0%	80%	100%	0%	0%
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	0	0	3	3	0	0	0	0
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	OPD	0	0	3	3	0	0	0	0
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	0	0	0	0	0	0	3	3
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	0	0	3	3	0	0	0	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja TW 1	Realisasi Kinerja TW 1	Target Kinerja TW 2	Realisasi Kinerja TW 2	Target Kinerja TW 3	Realisasi Kinerja TW 3	Target Kinerja TW 4	Realisasi Kinerja TW 4
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	OPD	0	0	3	3	0	0	0	0
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	0	0	0	0	0	0	3	3
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Percentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	%	80%	100%	0%	0%	80%	100%	0%	0%
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	0	0	3	3	0	0	0	0
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	OPD	0	0	3	3	0	0	0	0
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	0	0	12	12	0	0	0	0
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahannya	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	OPD	0	0	12	12	0	0	0	0
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahannya	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahannya	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	URAIAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja TW 1	Realisasi Kinerja TW 1	Target Kinerja TW 2	Realisasi Kinerja TW 2	Target Kinerja TW 3	Realisasi Kinerja TW 3	Target Kinerja TW 4	Realisasi Kinerja TW 4
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BidangKewilayahahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	12	12
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangda dan Penerapan Inovasi Daerah	%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
1	Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang Aspek Aspek Sosial	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	1
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	0	0	0	0	1	0		0
2	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	00%
1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen hasil penelitian, pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0
2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Laporan	0	0	0	0	3	3	0	0

Sumber : Laporan Kinerja Bappelitbangda Kep. Selayar tahun 2022

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 menyampaikan kendala dan upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja pelayanan sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 dengan Bupati Kepulauan Selayar. Adapun keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat terus di tingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappelitbangda tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis 5 (lima) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, hanya 3 (tiga) indikator sasaran yang baru dapat diukur dengan realisasi kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 adalah sebesar 117%;
2. Realisasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebesar Rp. 4.988.167.834,00 atau sebesar 97.16%;
3. Berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja utama dan data keuangan Bappelitbangda tahun 2022, maka terjadi efisiensi anggaran sebesar 25,00%;
4. Secara umum pencapaian target tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh konsistensi dalam implementasi program, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi baik pusat maupun propinsi dan stakeholder terkait, selain hal tersebut, ada beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi serta penelitian daerah, diantaranya :
 - Ketersediaan data pembangunan yang komprehensif dan kontribusi kegiatan penelitian terhadap pengambilan kebijakan perencanaan;

- Konsistensi dalam implementasi program, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi, baik pusat maupun propinsi dan stakeholder terkait.
5. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :
- Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai salah satu kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappelitbangda Kepulauan Selayar;
 - Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan kelitbangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah, dan stakeholder terkait, serta membuat kebijakan perencanaan yang efektif;
 - Melakukan desiminasi tentang data pembangunan daerah dan kelitbangan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Meningkatkan penerapan hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perumusan kebijakan maupun inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta inovasi lainnya sesuai kewenangannya.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyempurnaan dokumen perencanaan tahun selanjutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih maju dan lebih baik.